

MUSYAWARAH KITE

Penilaian BPK, Kubu Raya Naik Peringkat

SUNGAI RAYA. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya naik peringkat dalam penilaian Badan Pemeriksa Keuangan RI Kalimantan Barat, dari hasil pemeriksaan keuangan tahun 2012 ini mendapatkan penilaian wajar dengan pengecualian (WDP).

"Dua tahun sebelumnya, berturut-turut Kubu Raya mendapatkan penilaian," kata Plt Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kubu Raya, Yusran Anizam kepada wartawan, Rabu (27/6).

Dia menyatakan, sebenarnya sejak tahun 2010 dan 2011, pelaporan keuangan Kubu Raya sudah sangat baik. Hanya saja karena ada kendala pada pembenahan aset yang tersangkut di Kabupaten Pontianak sebagai kabupaten induk, dan masalah kerjasama dengan PLN, Kubu Raya selalu mendapatkan penilaian Tidak Wajar.

Namun, pada tahun ini, berkat kerja keras dari semua SKPD yang ada dan didorong oleh DPRD dan masyarakat Kubu Raya, akhirnya peringkat penilaian pengelolaan keuangan oleh BPK RI bisa ditingkatkan. "Ini tentu menjadi hal yang menggembirakan bagi kita, dan kita optimis pada tahun berikutnya Kubu Raya bisa kembali meningkatkan peringkatnya dari Wajar Dengan Pengecualian menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian rapor merah yang selama ini di dapat Kubu Raya tentu bisa menjadi lebih baik," tuturnya.

Untuk Kabupaten Kubu Raya, walaupun telah melakukan upaya-upaya perbaikan secara bertahap, hasil pemeriksaan BPK RI mencatat pengecualian yaitu pada Dinas Kesehatan terdapat selisih nilai perseediaan obat sebesar Rp 283.424.775 antara neraca dibandingkan dengan saldo akhir di gudang farmasi dan puskesmas.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya belum mengakui penyertaan modal pada PDAM Tirta Raya dan termasuk di dalamnya hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kubu Raya sebesar Rp 20.667.780.000 yang belum jelas statusnya.

"Selain itu, mutasi aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan. Aset tetap lainnya belum di rinci secara lengkap, dan belum didukung bukti-bukti yang memadai serta penyerahan dan inventarisasi aset hibah dari Pemerintah Kabupaten Pontianak belum tuntas. Makanya ke depan kita akan menuntaskan permasalahan aset ini dengan Pemkab Pontianak," kata Yusran.

Dia menyatakan, dari penilaian dari BPK pada tahun 2011 lalu, di mana ada beberapa hal yang harus di perbaiki oleh Kubu Raya terutama mengenai pembenahan aset dan kerjasama dengan PLN dalam Penanganan Jalan Umum. Berdasarkan hal tersebut, Muda menegaskan, seluruh SKPD untuk bisa meningkatkan kinerja dan memprioritaskan berbagai permasalahan yang krusial.

"Hasilnya, dengan kerja keras semua pihak dan motivasi yang diberikan pada seluruh SKPD, akhirnya penilaian BPK terhadap laporan pengelolaan keuangan dan aset daerah bisa diperbaiki," pungkasnya. (oen)